

Analisis KR

Yogyakarta Paripurna

P Ari Subagyo



KATA 'paripurna' digunakan Yudi Latif dalam buku *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (2011). Kata 'paripurna' menegaskan bahwa Pancasila sungguh pilihan yang tepat bagi Indonesia yang majemuk. Lacakan historis, rasional, dan aktual membuktikan Pancasila merupakan jati diri Bangsa Indonesia. Pancasila menjamin paripurnanya Indonesia sebagai negara-bangsa yang bertuhan, berkemanusiaan, bersatu, berdemokrasi, dan berkeadilan.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bukanlah barang asing. Pancasila sungguh hidup dan dihayati oleh Bangsa Indonesia. Maka, Soekarno dan para pendiri bangsa sesungguhnya hanya menggali dan merumuskan Pancasila menjadi butir-butir pernyataan yang jumlahnya lima itu.

Kata 'paripurna' dipinjam dalam tulisan ini untuk menengok sekaligus menyoal keparipurnaan Yogyakarta. Sebagai bagian dari Indonesia yang sedang kembali bergulat dengan kemajemukannya, apakah Yogyakarta sudah paripurna? Atau justru sebaliknya? Mengapa di DIY masih terus terjadi tindakan intoleransi, termasuk penolakan terhadap pejabat karena beragama minoritas? Benarkah Pancasila sudah tertanam dalam keseharian serta menjadi pandangan dan cara hidup warga DIY?

* Bersambung hal 7 kol 1

"KEDAULATAN RAKYAT"

SABTU LEGI, 21 JANUARI 2017

Yogyakarta

Sambungan hal 1

Sebagaimana diketahui, keberadaan rakyat dan Provinsi DIY bermula dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Keduanya merupakan negara merdeka dan berdaulat sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII pada 5 September 1945 memaklumkan bahwa dua negara itu meleburkan diri dalam NKRI. Maklumat itu tentunya mencakup kesediaan rakyat Yogyakarta mengakui dan mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara.

Pertanyaannya, apakah sebelum bergabung dengan NKRI, Pancasila sudah menjadi jati diri serta dijalani dan dihidupi oleh warga Yogyakarta? Jawabnya: "Sudah!" Ketika melebur ke dalam NKRI, *Nagari* Ngayogyakarta maupun Pakualaman memang beridentitas sebagai negara Islam. Identitas itu misalnya terpantul dari kata *Khalifatullah* (artinya 'Pemimpin') dalam gelar Sultan sejak Hamengku Buwono I. Namun, Yogyakarta tetap terbuka bagi semua pemeluk agama sebagaimana tercermin dalam gelar *Ngabdurrachman Sayidin Panatagama* yang berarti "Hamba Mulia sebagai Panutan Pengatur Kehidupan Beragama."

Secara faktual-historis, gelar *Panatagama* pada pemerintahan *Nagari Ngayogyakarta* memang diperlukan. Mengapa? Karena *kawula* Ngayogyakarta di awal kepemimpinan Sultan HB I masih merupakan masyarakat transisi dari penganut agama Hindu dan Budha yang diwarisi sejak masa Majapahit. Keyakinan itulah yang kemudian disebut 'Agama Jawa' dengan berbagai ritualnya yang hingga kini diakui sebagai kekayaan Budaya Jawa.

Sejak berdiri, *Nagari* Ngayogyakarta sudah dihuni pedagang Tionghoa yang beragama Konghucu. Hadir pula suku-suku lain sebagai wujud kerja sama: Sunda, Bugis, dsb. Sejak abad ke-19 sebagian *kawula* mulai

menganut agama Katolik dan Kristen. Artinya, gelar *Panatagama* memang diperlukan untuk mengatur kehidupan semua agama. Yogyakarta sejak semula memang berkodrat majemuk dalam suku dan agama. Sumbangan Yogyakarta bagi Indonesia sangat terasa, terutama dalam bidang pendidikan. Sultan HB IX meminjamkan kompleks kraton dan tanah untuk kampus UGM dan IKIP Yogyakarta (sekarang UNY). Dua kampus itu beserta kampus-kampus lain, negeri dan swasta, ditambah sekolah-sekolah menengah unggul, menjadikan DIY sebagai tujuan orang-orang muda se-Indonesia menimba ilmu. Predikat 'Indonesia Mini' sungguh tepat disandang DIY.

PT di DIY sekarang meliputi UGM, UNY, ISI, UPN, UIN Sunan Kalijaga, dan 105 PTS. Karena perkembangan, beberapa PT meluaskan kampusnya ke berbagai wilayah di DIY. Latar belakang etnis dan agama mahasiswa (yang dinaungi Pancasila dan dilindungi UUD 1945) tentu melekat-erat di manapun mereka berada. Interaksi sosial lintas-suku dan agama semakin meluas dan tak terhindarkan. Inilah pertanda berkembangnya DIY sebagai 'Indonesia mini'.

Selain itu, manajemen dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kinerja memungkinkan siapa pun menjadi apa pun asalkan memenuhi syarat, prosedur, dan tidak melanggar hukum. Manajemen dan tata kelola semacam itu diharapkan menghasilkan aparat yang bersih, adil, transparan, dan antikorupsi.

Jika demikian, setiap tindakan intoleransi sesungguhnya merupakan kemunduran, bahkan pengingkaran terhadap Maklumat 5 September 1945. Apalagi, dalam penutup, Sultan HB IX dan Paku Alam VIII menyatakan: "Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan Negeri Pakualaman mengindahkan amanat ini."

Yogyakarta sudah paripurna!

(Penulis Dekan FS USD Yogyakarta)-m